

PROSES ASESMEN PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS BNN KOTA TANJUNGPINANG)

Oleh

Purwandi

NIM. 180574201109

Abstrak

Asesmen Terpadu adalah sebuah proses yang wajib dijalankan oleh pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam rangka menentukan apakah seseorang tersebut bisa atau tidak untuk menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Pelaksanaan proses tersebut kemudian diatur berdasarkan Peraturan Bersama antara tujuh lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan mengambil wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian, ternyata terdapat ketidaksesuaian terhadap proses asesmen yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses asesmen penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika pada wilayah hukum resor Tanjungpinang berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori *Criminal Justice System*. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen terpadu hadir sebagai sarana bagi aparat untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika yang menjadi tujuan lahirnya Undang-Undang Narkotika. Tujuan Undang-Undang Narkotika ini merupakan penjabaran dari pada tujuan hukum itu sendiri. Melalui asesmen terpadu, kepastian penegakan hukum tetap terlaksana sekaligus keadilan bagi penyalahguna dapat diberikan dengan memberikan kesempatan untuk diasesmen kepada penyalahguna narkotika.

Kata Kunci: Asesmen, Pecandu , Korban.

**ASSESSMENT PROCESS FOR HANDLING OF DRUG ADDICTS AND
VICTIMS OF NARCOTICS ABUSE (CASE STUDY AT TANJUNGPINANG
CITY BNN)**

By

Purwandi

NIM. 180574201109

Abstract

Integrated assessment is a process that must be carried out by narcotics addicts and victims of narcotics abuse in order to determine whether or not a person is able to undergo rehabilitation, both medically and socially. The implementation of the process is then regulated based on a Joint Regulation between seven state institutions related to the handling of narcotics abuse crimes. By taking the jurisdiction of the Tanjungpinang Resort Police as the research location, it turned out that there was a discrepancy with the assessment process that occurred. The purpose of this study was to determine the implementation of the assessment process for handling narcotics addicts and victims of narcotics abuse in the Tanjungpinang resort jurisdiction based on applicable legal rules. The theory used in this research is the Theory of Legal Assurance and Theory of Criminal Justice System. The type of research used is normative juridical with a statute approach. The results of the study indicate that the integrated assessment is present as a means for the apparatus to carry out law enforcement against narcotics abusers which is the purpose of the Narcotics Law. The purpose of this Narcotics Law is an elaboration of the purpose of the law itself. Through an integrated assessment, the certainty of law enforcement is still carried out as well as justice for abusers can be provided by providing opportunities for assessment for narcotics abusers.

Keywords: *Assessment, Addicts, Victims*